



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN
PEMBUKAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XII dan XIII

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua!

Yang saya hormati:

- **Kepala Badan Diklat DIY;**
- **Para Widyaiswara;**
- **Serta Hadirin dan Peserta Pelatihan Dasar yang berbahagia,**

Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena hanya atas

rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita semua berada dalam keadaan sehat wal-afiat, sehingga dapat menghadiri pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan III Angkatan XII dan XIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Diklat DIY).

Hadirin dan Peserta Latsar ,

Di era demokratisasi dan transparansi sekarang ini, segenap Aparatur Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus menerus disorot dan dinilai secara kritis oleh semua elemen masyarakat. Berbagai macam predikat yang menyudutkan kerap kali mewarnai wajah birokrasi kita. Bahkan kondisi ideal PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Negara yang memiliki peran penting belum terfigur secara utuh. Figur PNS sebagai sosok yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; memiliki kompetensi terindikasi dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawab sebagai pelayan publik; menjadi

perekat persatuan dan kesatuan bangsa, rupa-rupanya masih belum dapat terwujud sempurna hingga saat ini.

Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya berbagai perilaku PNS yang negatif, yang akhirnya melahirkan stigma di masyarakat, bahwa PNS tidak bisa bekerja secara profesional. Di sisi lain, masyarakat mendambakan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional tersebut, maka seorang CPNS wajib mengikuti pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar (Latsar), sebagai dasar untuk bisa diangkat menjadi PNS. Artinya, Latsar adalah salah satu syarat wajib yang harus diikuti CPNS sebelum menjadi PNS. Oleh karena itu para peserta Latsar diharapkan mengoptimalkan kesempatan Latsar dengan bersungguh-sungguh, menjalani dengan disiplin dan sebaik-baiknya.

Hadirin dan Peserta Latsar yang berbahagia,

Pelaksanaan Latsar ditekankan pada pengembangan karakter CPNS atau Calon ASN.

Saudara-saudara akan dibekali pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya, supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sekaligus dibekali kemampuan untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta lebih mengedepankan sisi kompetensi calon aparatur.

Artinya, dalam menjalankan tugas jabatan Profesi PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat itu meliputi, Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Bahkan dibekali kemampuan untuk meningkatkan sikap perilaku disiplin, kesehatan jasmani dan rohani sebagai pelayan masyarakat. Dibekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS sebagai Pilar Kesatuan Bangsa dan sebagai Penyelenggara Pemerintahan, serta mendapatkan fasilitasi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Profesi PNS, Sikap dan Perilaku Disiplin PNS, berikut Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kaitan itulah maka Saya minta, saudara-saudara dapat memahami secara mendalam organisasi, visi, misi serta tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab saudara-saudara. Ikutilah Latsar ini dengan sungguh-sungguh, tertib dan disiplin. Lebih mengutamakan hasil dan manfaat, bukan sekedar memenuhi syarat administrasi untuk bisa diangkat menjadi PNS. Hal itu mengingat Latsar CPNS dilakukan untuk mengubah pola perilaku dan *mindset* peserta Latsar, agar mampu menjadi pelayan publik yang profesional ketika mereka kembali ke dunia kerja.

Latsar yang diselenggarakan diharapkan menjadi jawaban atas diklat CPNS yang selama ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Artinya, perubahan Diklat Pra Jabatan menjadi Pelatihan Dasar bukan hanya perubahan nama saja, tetapi lebih kepada perubahan *mindset* PNS dalam memahami nilai-nilai dasar PNS atau ASN. Sehingga nantinya saudara-saudara bisa menjadi sosok PNS yang benar-benar mempunyai kompetensi, mampu bekerja secara efektif, efisien dan akuntabel, dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Hadirin dan Peserta Latsar yang saya hormati,

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penting ini. Mengingat dalam Latsar

tetap diberlakukan secara ketat aturan yang berlaku, dalam arti segala sesuatu yang bersifat pelanggaran akan ada tindakan yang berupa hukuman, untuk itu semua materi yang diberikan dalam Latsar diharapkan dapat memberikan efek positif bagi unit organisasi masing-masing.

Jangan buang kesempatan dalam suatu proses yang sudah dirintis dengan panjang. Jangan sampai performa saudara-saudara tidak memenuhi syarat, dengan kata lain tidak lulus atau tidak sanggup menyelesaikan kegiatan Latsar sepenuhnya. Karena tidak hanya akan merugikan karier saudara-saudara sendiri, tetapi juga berdampak kepada instansi, mengingat biaya yang besar terbuang sia-sia.

Selamat mengikuti Latsar, semoga bekal pengetahuan yang di dapat dapat saudara-saudara manfaatkan dan operasionalkan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, pada hari ini, Jum'at Pahing, tanggal 21 Juni 2019, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XII dan Angkatan XIII, Badan Diklat DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.

Terima kasih perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

SKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI I DPRD PROVINSI BANTEN
Yogyakarta, 17 Juni 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang kami hormati, Pimpinan Rombongan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten;**
- **Bapak/Ibu, Tamu Undangan, serta Hadirin yang berbahagia.**

Seiring dengan langkah sang waktu, marilah sejenak kita tundukkan kepala, memanjatkan puja puji seraya mengucapkan rasa syukur kehadiran *Allah SWT, ilahi rabbi*, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki tanpa halangan suatu apapun, dan masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan

sejahtera. Itu semua berkat lindungan, rakhmat dan ridho-Nya.

Masih dalam suasana lebaran, kami beserta jajaran mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua masih dipertemukan dengan Ramadhan dan Idul Fitri tahun depan. Amin.

Selamat datang kepada Bapak/Ibu rombongan Komisi I DPRD Provinsi Banten yang membidangi Pemerintahan. Hukum dan Kepegawaian, di Yogyakarta, kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan memilih DIY sebagai lokasi kunjungan kerja Bapak Ibu sekalian.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan Bapak/Ibu sekalian dapat berdiskusi, berbagi pengalaman maupun menambah wawasan. Untuk itu kami akan selalu berusaha dapat membantu seoptimal mungkin, agar kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Bapak/Ibu sekalian dapat memperoleh masukan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Sebagai pengantar pertemuan pada hari ini, perkenankanlah kami memberikan selayang pandang mengenai tata cara pembuatan produk hukum daerah, salah satunya yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Asas pembentukkan Produk Hukum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Dengan materi muatan, harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adapun jenis Produk Hukum Daerah yang dibentuk meliputi Peraturan Daerah (Perda); Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); Peraturan Gubernur

(Pergub); Peraturan Bersama Gubernur; dan Keputusan Gubernur. Sementara terkait dengan maksud dan tujuan kunjungan kerja Bapak Ibu sekalian, yakni mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY, di tempat ini telah hadir bersama kita, perwakilan dari instansi terkait yang akan menjelaskan lebih lanjut.

Kami yakin ada banyak hal menarik yang tentunya akan menambah wawasan kita semua, dalam memahami Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ini.

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dalam pertemuan ini semua hal yang menjadi pertanyaan Bapak/Ibu di sesi tanya-jawab nanti, dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan memuaskan. Selamat berdiskusi dan kami berharap kita masih dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang lain.

Sekian, terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENUTUPAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
ANGKATAN I
BADAN DIKLAT DIY TAHUN 2019**

Gunung Sempu, 15 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati,

- Para Widyaiswara dan Para Instruktur;
- Saudara-saudara Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2019;
- Segenap Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi

kesempatan untuk hadir dan berkumpul ditempat ini guna mengikuti Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Peserta Diklat sekalian yang berbahagia,

Kondisi birokrasi saat ini masih memperlihatkan *mindset* aparatur yang perlu dirubah, tidak hanya struktur dan fungsinya tetapi juga perilaku aparaturnya. Perubahan perilaku aparatur memberikan kesadaran baru bahwa pemerintah dibentuk tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat. Perubahan perilaku tersebut dari mesin politik dimasa lalu, dimana masyarakat masih melihat ada kesenjangan antara kinerja ASN yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dihasilkan.

Fenomena kesenjangan ini menjadi bukti bahwa aparatur pemerintah masih memiliki kompetensi yang kurang optimal yang mengakibatkan rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di instansi pemerintah. Berkaitan dengan itu, aparatur sekarang sudah harus netral dan profesional dalam mengembangkan diri, merubah karakter dan sikap perilaku, kemampuan menjunjung tinggi etika publik dan taat pada nilai-nilai, norma-norma, moralitas serta

bertanggung jawab agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasinya.

Terkait dengan hal tersebut, kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti diklat kepemimpinan ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan sumber daya aparatur di instansi masing-masing. Saya berharap keikutsertaan pada diklat ini bukan hanya didasari oleh kewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan struktural eselon III akan tetapi merupakan perwujudan upaya kita bersama dalam rangka mengembangkan kompetensi para pejabat struktural eselon III sesuai dengan tuntutan aturan kompetensi yang diharapkan.

Hadirin dan Peserta Diklat sekalian,

Pelaksanaan tugas pada jabatan struktural eselon III, baik pada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila ASN yang menduduki jabatan struktural telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut diindikasikan oleh kemampuan dalam menguasai secara teknis bidang tugasnya, kemampuan dalam menempatkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya dan kemampuan yang menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Hal ini karena tantangan dalam membenahi birokrasi atau sektor publik sangat besar dan menjadi pekerjaan rumah kita bersama di dunia birokrasi, untuk itu diperlukan pemimpin perubahan yang mempunyai kemampuan kepemimpinan adaptif dan daya inovasi yang tinggi. Upaya untuk membentuk kepemimpinan di birokrasi pemerintahan sampai saat ini memang belum optimal, salah satu upaya yang dinilai dapat membentuk kepemimpinan birokrasi adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan aparatur.

Untuk itu melalui diklat kepemimpinan tingkat III pola baru yang diikuti ini, diharapkan dapat membentuk Bapak/Ibu/Saudara menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu memperbaiki kualitas sektor publik di instansi masing-masing, dan dengan kapasitas yang dimiliki diharapkan dapat mampu melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kinerja di instansi masing-masing.

Wujudkanlah kemampuan profesional dan didukung dengan mental yang baik, kemauan, rasa tanggung jawab dalam menciptakan situasi kerja yg baik dan harmonis baik dengan pimpinan maupun dengan staf, karena hal tersebut akan mencapai kinerja yang optimal dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Kiranya apa yang Saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perenungan kita bersama serta dapat lebih memberikan kita motivasi dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan dipundak kita.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Dengan disertai rasa syukur memohon ridho-Nya dan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, **Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2019**, Saya nyatakan ditutup secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Gunung Sempu, 15 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN
Peresmian Gedung Kalibrasi dan Arsip dan
Syawalan Balai Laboratorium Kesehatan dan
Kalibrasi
Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Yang saya hormati

- Kepala Dinas Kesehatan DIY
- Kepala Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan Kemenkes RI
- Kepala Sub Dit Fasyankes lainnya Kemenkes RI
- Direktur RSJ Grhasia
- Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan DIY
- Para Kepala UPT Dinas Kesehatan DIY
- Para Mantan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan

DIY

- Dan Para Hadirin sekalian

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesempatan, sehat, dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara peresmian Gedung Kalibrasi & Arsip serta Syawalan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY

Saudara-saudara yang berbahagia,

Saya atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara-saudara yang penuh keikhlasan untuk menghadiri acara hari ini, dengan berharap semoga apa yang kita lakukan menjadi amal perbuatan yang baik dihadapan Allah SWT.

Dalam Kesempatan berbahagia ini kami mengajak Saudara-Saudara untuk melapangkan dada, membuka hati dengan sabar dan penuh keikhlasan, atas Ridlo Allah SWT meminta dan memberi maaf atas kesalahan diantara kita semua. Kami menghaturkan *Selamat Idul Fitri 1440 H. Taqobbalallahu minna wa minkum. Barakallahu Fiikum*

Saudara- Saudara Yang Berbahagia,

Balai Laboratorium Kesehatan berdiri tanggal 25 Januari 1950. Merupakan laboratorium *Assaineering* yang di pimpin oleh Prof Dr Sardjito. Seiring berjalannya waktu, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta mengalami perubahan nama, berdasarkan Peraturan Gubernur 87/2018 Balai Laboratorium Kesehatan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY yang beralamat di Ngadinegaran MJ. III/62 Yogyakarta, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2018 yang mengatur tentang fungsi Balabkes dan kalibrasi sebagai unit yang memberikan pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan. Dengan demikian kami berharap Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY ini, mampu melayani Kalibrasi untuk seluruh Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Utama, Dokter praktek swasta seluruh DIY maupun Jawa Tengah bagian selatan. Mengingat layanan Kalibrasi terdekat hanya ada di PT. Adi Multi Kalibrasi dan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta, sehingga Fasyankes yang akan

melakukan kalibrasi, maka akan mengalami antrian yang sangat panjang.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya Kalibrasi bukan hanya menjadi syarat penting untuk memperoleh predikat akreditasi, tetapi alat kesehatan maupun alat laboratorium harus memiliki keakurasian yang tepat, tejamin mutunya, menjamin keselamatan bagi pengguna dan pasien, dan terjaga spesifikasi maupun kondisinya.

Saudara- Saudara sekalian,

Kami memohon doa dan restu saudara-saudara, pagi ini akan diresmikan ***Gedung Kalibrasi dan Arsip Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi “Darma Sasana Husada”***. Sesuai maknanya, Darma adalah salah satu dewa kejujuran, Sasana adalah tempat dan Husada adalah berupaya untuk sehat. Semoga fasilitas ini akan memberikan manfaat bagi semua pengguna jasa layanan medis baik teknis maupun klinis. Semoga gedung ini tidak hanya menghasilkan tenaga kesehatan yang jujur tetapi juga bisa menghasilkan alat-alat yang terkalibrasi secara baik, sehingga dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang valid serta akurat.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ka Dinkes DIY, Kepala BPFK Kemenkes RI, Ka Subdit Fasyankes Lainnya Kemenkes RI yang telah melakukan bimbingan selama ini dan keluarnya ijin

operasional sebagai Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY dari Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/1/1485/2019 , sehingga kita dapat membangun dan mengoperasikan Gedung Kalibrasi.

Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, dengan ini kami resmikan Gedung DARMA SASANA HUSADA sebagai gedung Kalibrasi dan Arsip Balai Laboratorium Dinas Kesehatan DIY.

Terima kasih.

Wabillaahit taufiq walhidaayah, wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
P E M B U K A A N
FOCUS GROUP DISCUSSION
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) DAN SISTEM INFORMASI KREDIT
PROGRAM (SIKP) SERTA PEMBIAYAAN
ULTRA MIKRO (UMI)**

Yogyakarta, 26 Juni 2019

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua!

- **Yang kami hormati, Kepala Kanwil DJPB DIY; beserta jajaran.**
- **Para Peserta FGD dan Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di tempat ini, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPB DIY).

Hadirin dan peserta FGD,

Untuk lebih memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah melakukan upaya mendorong perbankan nasional menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Strategi yang ingin diharapkan dengan adanya KUR ini adalah, UMKM bisa menjadi usaha yang maju dan mandiri.

Kendati KUR sudah disediakan Pemerintah, tetapi harus kita akui keberadaannya belum cukup membantu banyak pelaku UMKM. Masih tetap ada permasalahan yang krusial yang dihadapi para pelaku

UMKM di DIY, yaitu lemahnya kemampuan untuk mengakses permodalan yang mereka butuhkan. Tidak sedikit yang mengajukan KUR, tetapi tidak sedikit pula yang lolos. Padahal kita ketahui bersama, sektor ekonomi kerakyatan ujung tombaknya ada pada UMKM dan KUR.

Menyikapi dan melihat permasalahan krusial tersebut, kemudian Pemerintah menyediakan program pembiayaan Ultra Mikro atau UMi, sebagai alternatif bagi pelaku usaha mikro untuk [mendapatkan pinjaman](#) modal usaha.

Sejak tahun 2017 UMi sudah bisa diakses para pelaku usaha mikro yang butuh modal usaha. Dengan adanya program pinjaman modal usaha ini, pelaku usaha yang dinyatakan bank tidak layak pinjaman atau tidak mempunyai agunan bisa memperoleh pinjaman dari program UMi ini.

Sejalan dengan hal itu, maka kami sangat menyambut baik FGD yang diselenggarakan ini,

karena memiliki nilai penting dan strategis bagi pelaksanaan KUR dan SIKP, serta pembiayaan Umi.

Kepada para peserta FGD, kami minta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh–sungguh, mencermati setiap penjelasan agar dapat memahami hal-hal yang disampaikan nara sumber dengan baik, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Sehingga Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Informasi Kredit Program, serta Pembiayaan Ultra Mikro tidak lagi menimbulkan persoalan baru yang justru akan membuat pemanfaatan kegiatan ini menjadi sia-sia.

Hadirin dan peserta FGD yang kami hormati,

Menutup sambutan ini, kami sampaikan bahwa Pemda DIY senantiasa memberikan perhatian terhadap suksesnya pelaksanaan KUR dan mendukung sepenuhnya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

Selamat mengikuti FGD, semoga kegiatan FGD dapat dijadikan momen penting untuk meningkatkan sinergi, dan pada gilirannya dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang menjadi masukan terkait monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, serta implementasi dari skema baru pembiayaan untuk pengusaha di level sangat mikro yakni UMi, sekaligus memunculkan rekomendasi untuk mendorong rangsangan bagi pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan usaha kecil dan pemberdayaan wirausahawan baru.

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, serta senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, **pada hari ini, Rabu Pahing, tanggal 26 Juni 2019, Focus Group Discussion Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Informasi Kredit Program, serta**

Pembiayaan Ultra Mikro, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN
Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengadaan
Barang/Jasa.

Yogyakarta, 20 Juni 2019

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yang Saya hormati,

- Inspektur DIY
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
- Kepala Bappeda DIY
- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
- Sekretaris DPRD DIY
- Kepala Dinas Kebudayaan DIY
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
- Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

- Bapak dan Ibu peserta Focus Group Discussion Strategi Pengadaan Barang/Jasa

Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin sekalian, untuk selalu mengucapkan *Alhamdulillah*, sebagai ungkapan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala - Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat, dan dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengadaan Barang/Jasa.

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada panitia penyelenggara FGD Strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan harapan strategi pengadaan barang/jasa, khususnya implementasi katalog lokal/daerah bisa dirumuskan atas dasar pemikiran kolektif kita bersama.

Hadirin yang berbahagia,

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD melalui proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa, maka Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disingkat UKPBJ.

UKPBJ merupakan hasil transformasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diantaranya memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengamanatkan Kepala Daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Tugas dan fungsi UKPBJ menurut Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

- a) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c) pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d) pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, salah satu tugas UKPBJ adalah menyusun dokumen strategi pengadaan barang/jasa. Dokumen strategi pengadaan melibatkan stakeholder dengan berbagai disiplin ilmu, untuk mendapatkan strategi

yang tepat sehingga proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, salah satu ukuran keberhasilan aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah terimplementasinya *e-katalog* daerah.

Hadirin yang kami hormati,

E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah. Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.

Lambat laun, katalog akan menggantikan tender sebagai primadona pengadaan karena keunggulan dalam hal kecepatan, kemudahan, dan akuntabilitas. Pengadaan menggunakan tender tergolong metode yang rumit, memakan waktu, tenaga, dan biaya. Melalui penerapan e-katalog lokal, UKPBJ di daerah akan dilibatkan langsung dalam proses katalogisasi. Produk dan komoditas yang dikatalogkan meliputi produk-produk di daerah, termasuk produk-produk UMKM yang terstandar dan memenuhi persyaratan. Katalog Lokal diharapkan dapat mendukung proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

Hadirin yang kami hormati,

Marilah secara bersama-sama, bahu membahu, membulatkan tekad “*Sawiji Greget, Sengguh Ora Mingkuh*” dalam rangka menciptakan pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Akhir kata, disertai rasa syukur memohon ridho-Nya dan dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmanirrahim*, *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengadaan Barang/Jasa Saya nyatakan dibuka secara resmi.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PEMBUKAAN
FORUM KERJASAMA ANTAR DAERAH
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2019**

Yogyakarta, 20 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam,

Yang Kami hormati,

- Perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI;
- Para Narasumber;
- Para Kepala Dinas yang membidangi Transmigrasi dari Provinsi/Kabupaten/Kota dari berbagai penjuru Indonesia;
- Para Peserta Forum Kerjasama Antar Daerah Penyelenggaraan Transmigrasi Tahun 2019;
- Para Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia;

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara Forum Kerjasama Antar Daerah Penyelenggaraan Transmigrasi Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini serta masih dalam suasana bulan Syawal maka ijinilah Saya atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pribadi dan keluarga untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon Maaf Lahir dan Batin bagi Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Memperhatikan pasal 130 PP. No. 3 Tahun 2014 ayat (1) berbunyi pelaksanaan transmigrasi merupakan proses pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dimana pelaksanaan transmigrasi minimal melibatkan 2 (dua) pemerintah daerah yakni pemerintah Daerah Tujuan yang menyediakan ruang sekaligus tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja, dan pemerintah

Daerah Asal yang menyediakan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan.

Masing-masing pemerintah daerah harus memperoleh manfaat seoptimal mungkin tanpa merugikan pihak lain. Para pihak berada dalam situasi ketergantungan positif, karena pada dasarnya satu daerah tidak dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya tanpa kontribusi dari daerah lain.

Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah Pusat yaitu Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi dan pemerintah provinsi berperan sebagai mediator dan fasilitator. Sedangkan perumusan kebutuhan dan perencanaan program serta pelaksanaannya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait.

Penyelenggaraan transmigrasi melalui mekanisme Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 363 pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan demikian, melalui kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pmda merupakan salah

satu cara untuk menjadikan transmigrasi sebagai program bersama yang disusun dan dilaksanakan bersama untuk kepentingan bersama. Melalui kebersamaan tersebut diharapkan transmigrasi dapat memberikan manfaat bersama bagi Daerah Asal, Daerah Tujuan dan kepentingan nasional.

Bagi daerah asal, perpindahan sebagian penduduknya melalui transmigrasi merupakan salah satu upaya mengatasi dampak tekanan kependudukan sekaligus memberikan peluang berusaha dan kesempatan kerja. Sedangkan bagi Daerah Tujuan, dengan menata persebaran penduduk akan tumbuh dan berkembang pusat pertumbuhan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah dalam kerangka peningkatan daya saing nasional.

Hadirin sekalian,

Forum Kerjasama Antar Daerah Penyelenggaraan Transmigrasi Tahun 2019 dilaksanakan guna membangun satu kesatuan kerangka berpikir, cara pandang, dan pola sikap para penyelenggara transmigrasi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan layanan kerjasama antar daerah. Perlu media dialog, diskusi dan saling berbagi informasi potensi calon lokasi transmigrasi yang akan menjadi program sharing anggaran dan potensi SDM daerah asal.

Melalui forum ini diharapkan akan memperoleh hasil rumusan bersama yang dapat digunakan sebagai bahan kebijakan program pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi tahun. Penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan urusan pilihan diharapkan akan memberikan manfaat maksimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi suksesnya pembangunan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN PADA ACARA
HALAL BI HALAL KELUARGA RS Jiwa
GRHASIA DAN TASYAKURAN LULUS
PARIPURNA AKREDITASI RS SNARS EDISI I
TAHUN 2018

Yogyakarta, 20 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati:

- **Direktur dan Jajaran Manajemen RS Jiwa Grhasia**
- **Segenap Civitas Hospitalia**
- **Hadirin dan Saudara sekalian yang kami banggakan,**

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insyah Allah* penuh berkah ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat *Allah SWT*, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa diberi nikmat kesempatan, kesehatan, dan bisa hadir di tempat ini dapat bertemu bersilaturahmi, dalam acara Halal Bi Halal Keluarga RS Jiwa Grhasia dan Tasyakuran Paripurna Akreditasi RS Snars Edisi I Tahun 2018.

Kami atas nama Pemda DIY, mengucapkan *selamat* dan *apresiasi* atas kelulusan Paripurna Akreditasi RS SNARS Edisi I Tahun 2018 yang diraih. Semoga bisa memacu dan mendorong pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Dan, semoga kelak dapat pula mencapai tataran sertifikasi internasional sekelas *Joint Commission International (JCI)*. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran RS Jiwa Grhasia dan hadirin sekalian, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Halal Bi Halal ini, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal perbuatan yang baik di hadapan *Allah SWT*.

Hadirin sekalian,

Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat Halal Bi Halal ini ialah tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab diantara sesama kita. Jika hari raya dikaitkan dengan kelahiran kembali untuk mengingatkan pada fitrah kita, ibarat makhluk tanpa dosa, maka momentum Idul Fitri sudah seharusnya menggugah kesadaran baru untuk kembali pada harkat kemanusiaan sebagai makhluk yang fitrah dan makna hakiki Idul Fitri, sesuai dengan makna bulan Syawal sebagai bulan peningkatan.

Kaitannya dengan hubungan sesama manusia, melalui kegiatan Halal Bi Halal atau Syawalan ini, tentunya kita semua diharapkan dapat saling membersihkan diri dengan tulus dan ikhlas, saling memberi dan meminta maaf kepada sesama atas segala khilaf dan dosa yang pernah kita perbuat, serta tidak lagi mengulangi kesalahan atau kekhilafan yang kita perbuat sebelumnya. Sehingga menjadikan Halal Bi Halal ini sebagai wahana dan sarana untuk lebih memperkuat komitmen dan tekad, guna lebih meningkatkan kualitas saling mengenal dan saling memahami untuk meningkatkan jalinan silaturahmi diantara kita semua.

Lebih jauh lagi, kegiatan Halal Bi Halal ini diharapkan menjadi titik awal bagi kita semua untuk bersiap diri, menyiapkan konsep, guna berpartisipasi dan berkontribusi merealisasikan dan mewujudkan visi dan misi DIY, serta menjadikan kita siap bekerjasama melakukan evaluasi dan instropeksi diri.

Hadirin dan Saudara sekalian yang kami hormati,

Ramadhan bulan membakar semua dosa, Syawal bulan peningkatan amal, dan Idul Fitri kembali fitrah. Semoga semua amal baik kita, *Insyallah* pahalanya dilipatgandakan oleh *Allah SWT*, dan segala khilaf dosa mendapat ampunan dari-Nya.

Dengan Halal Bi Halal, mari kita kukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak sebatas tawar-menawar, tetapi dengan tawaran kehidupan budaya dan rasa kebangsaan yang lebih hangat. Senantiasa membangun persamaan dan kebersamaan untuk menuju adicita bangsa, bersatu dalam karya, beragam dalam kreatifitas, mengabdikan dan berbakti untuk bangsa dan negara.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, *selamat* dan *penghargaan yang tinggi* atas kelulusan Paripurna Akreditasi RS Snars Edisi I Tahun 2018.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2019

SEKRETARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
KUNJUNGAN KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami hormati,

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
- Para Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Atas nama masyarakat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya menyampaikan ucapan “Selamat Datang” di Yogyakarta kepada seluruh rombongan yang telah berkenan untuk melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Berkaitan dengan materi Kunjungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai manajemen penanggulangan bencana khususnya bencana Gunung Merapi dan tsunami akan kami sampaikan sedikit pengantar.

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY tahun 2018-2022 telah dijelaskan bahwa potensi ancaman bencana Gunung Merapi dan tsunami masuk dalam kelas resiko ‘tinggi’. Penentuan kelas resiko tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Kemudian, wilayah DIY rawan gempa bumi tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami karena berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada disisi selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut.

Selanjutnya, penanggulangan Bencana di DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pemda DIY dalam penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY.

Manajemen penanggulangan bencana DIY disusun dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui pengembangan keterpaduan perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan. Arah kebijakan dalam mitigasi bencana adalah melalui pengurangan risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi.

Demikian sekiranya sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Berkaitan dengan materi kunjungan kerja yang lebih mendalam, telah dipersiapkan data-data dan penjelasan secara rinci oleh OPD terkait. Untuk penjelasan lebih lanjut secara terperinci dan mendalam, Saya persilahkan untuk dapat membahasnya pada diskusi selanjutnya dengan OPD tersebut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
KUNJUNGAN KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami hormati,

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
- Para Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Atas nama masyarakat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya menyampaikan ucapan “Selamat Datang” di Yogyakarta kepada seluruh rombongan yang telah berkenan untuk melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Berkaitan dengan materi Kunjungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai manajemen penanggulangan bencana khususnya bencana Gunung Merapi dan tsunami akan kami sampaikan sedikit pengantar.

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY tahun 2018-2022 telah dijelaskan bahwa potensi ancaman bencana Gunung Merapi dan tsunami masuk dalam kelas resiko ‘tinggi’. Penentuan kelas resiko tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Kemudian, wilayah DIY rawan gempa bumi tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami karena berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada disisi selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut.

Selanjutnya, penanggulangan Bencana di DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pemda DIY dalam penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY.

Manajemen penanggulangan bencana DIY disusun dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui pengembangan keterpaduan perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan. Arah kebijakan dalam mitigasi bencana adalah melalui pengurangan risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi.

Demikian sekiranya sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Berkaitan dengan materi kunjungan kerja yang lebih mendalam, telah dipersiapkan data-data dan penjelasan secara rinci oleh OPD terkait. Untuk penjelasan lebih lanjut secara terperinci dan mendalam, Saya persilahkan untuk dapat mem bahas nya pada diskusi selanjutnya dengan OPD tersebut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
P E M B U K A A N
FOCUS GROUP DISCUSSION
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) DAN SISTEM INFORMASI KREDIT
PROGRAM (SIKP) SERTA PEMBIAYAAN
ULTRA MIKRO (UMI)**

Yogyakarta, 26 Juni 2019

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua!

- **Yang kami hormati, Kepala Kanwil DJPB DIY; beserta jajaran.**
- **Para Peserta FGD dan Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di tempat ini, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPB DIY).

Hadirin dan peserta FGD,

Untuk lebih memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah melakukan upaya mendorong perbankan nasional menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Strategi yang ingin diharapkan dengan adanya KUR ini adalah, UMKM bisa menjadi usaha yang maju dan mandiri.

Kendati KUR sudah disediakan Pemerintah, tetapi harus kita akui keberadaannya belum cukup membantu banyak pelaku UMKM. Masih tetap ada permasalahan yang krusial yang dihadapi para pelaku UMKM di DIY, yaitu lemahnya kemampuan untuk

mengakses permodalan yang mereka butuhkan. Tidak sedikit yang mengajukan KUR, tetapi tidak sedikit pula yang lolos. Padahal kita ketahui bersama, sektor ekonomi kerakyatan ujung tombaknya ada pada UMKM dan KUR.

Menyikapi dan melihat permasalahan krusial tersebut, kemudian Pemerintah menyediakan program pembiayaan Ultra Mikro atau UMi, sebagai alternatif bagi pelaku usaha mikro untuk [mendapatkan pinjaman modal usaha](#).

Sejak tahun 2017 UMi sudah bisa diakses para pelaku usaha mikro yang butuh modal usaha. Dengan adanya program pinjaman modal usaha ini, pelaku usaha yang dinyatakan bank tidak layak pinjaman atau tidak mempunyai agunan bisa memperoleh pinjaman dari program UMi ini.

Sejalan dengan hal itu, maka kami sangat menyambut baik FGD yang diselenggarakan ini, karena memiliki nilai penting dan strategis bagi pelaksanaan KUR dan SIKP, serta pembiayaan Umi.

Kepada para peserta FGD, kami minta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh–sungguh, mencermati setiap penjelasan agar dapat memahami hal-hal yang disampaikan nara sumber dengan baik, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Sehingga Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Informasi Kredit Program, serta Pembiayaan Ultra Mikro tidak lagi menimbulkan persoalan baru yang justru akan membuat pemanfaatan kegiatan ini menjadi sia-sia.

Hadirin dan peserta FGD yang kami hormati,

Menutup sambutan ini, kami sampaikan bahwa Pemda DIY senantiasa memberikan perhatian terhadap suksesnya pelaksanaan KUR dan mendukung sepenuhnya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

Selamat mengikuti FGD, semoga kegiatan FGD dapat dijadikan momen penting untuk meningkatkan sinergi, dan pada gilirannya dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang menjadi masukan terkait monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, serta implementasi dari skema baru pembiayaan untuk pengusaha di level sangat mikro yakni UMi, sekaligus memunculkan rekomendasi untuk mendorong rangsangan bagi pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan usaha kecil dan pemberdayaan wirausahawan baru.

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, serta senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, **pada hari ini, Rabu Pahing, tanggal 26 Juni 2019, Focus Group Discussion Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Informasi Kredit Program, serta**

Pembiayaan Ultra Mikro, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PEMBUKAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XV DAN XVI**

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua!

Yang saya hormati:

- **Kepala Badan Diklat DIY**
- **Para Widyaiswara Badan Diklat DIY**
- **Hadirin dan Peserta Pelatihan Dasar yang berbahagia,**

Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena hanya atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita semua berada

dalam keadaan sehat wal-afiat, sehingga dapat menghadiri rangkaian kegiatan pembukaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan III Angkatan XV dan XVI, yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Diklat DIY).

Hadirin dan Peserta Diklat ,

Di era demokratisasi dan transparansi sekarang ini, segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS terus menerus di sorot dan di nilai secara kritis oleh semua elemen masyarakat. Berbagai macam predikat yang menyudutkan, mewarnai wajah birokrasi kita. Bahkan kondisi ideal PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia ASN yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta sosok PNS yang memiliki kompetensi terindikasi dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawab sebagai pelayan publik, maupun mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, rupa-rupanya masih belum dapat terwujud sempurna hingga saat ini.

Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya berbagai perilaku PNS yang negatif, yang akhirnya melahirkan stigma di masyarakat, bahwa PNS tidak bisa bekerja secara profesional. Padahal masyarakat membutuhkan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya, sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional tersebut nantinya, maka seorang CPNS wajib mengikuti pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar (Latsar), sebagai dasar untuk bisa diangkat menjadi PNS. Artinya Latsar adalah salah satu syarat wajib yang harus diikuti CPNS sebelum menjadi PNS. Oleh karena itu para peserta Latsar diharapkan mengoptimalkan kesempatan Latsar dengan bersungguh-sungguh, menjalani dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan disiplin..

Hadirin dan Peserta Latsar yang berbahagia,

Latsar CPNS ditekankan pada nilai-nilai dasar ASN, yaitu pengembangan karakter, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi selain dituntut untuk memahami nilai-nilai dasar ASN, setiap CPNS juga dituntut

menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hal itu mengingat tantangan ASN saat ini sangat beragam.

Untuk itu dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi baik kompetensi manajerial maupun kompetensi sosio kultural. Karena dalam sistem merit saat ini, karier seorang ASN dipengaruhi oleh kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimilikinya. Bukan berdasar pada faktor-faktor lain yang selama ini sering disalahgunakan dalam menentukan karier seorang ASN.

Karena saudara-saudara akan dibekali pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya, supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dibekali kemampuan untuk meningkatkan sikap perilaku disiplin, sehat jasmani dan rohani sebagai pelayan masyarakat, serta dibekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS sebagai Pilar Kesatuan Bangsa dan sebagai Penyelenggara Pemerintahan, serta mendapatkan fasilitasi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS, Sikap dan Perilaku Displin PNS, berikut Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya minta, saudara-saudara dapat memahami secara mendalam organisasi, visi, misi serta tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab saudara-saudara

Ikutilah Latsar CPNS ini dengan sungguh-sungguh, tertib dan disiplin. Lebih mengutamakan hasil dan manfaat, bukan sekedar hanya untuk memenuhi syarat administrasi agar bisa diangkat menjadi PNS. Hal itu mengingat Latsar CPNS dilaksanakan untuk mengubah pola perilaku dan *mindset* peserta Latsar, agar mampu menjadi pelayan publik yang profesional ketika mereka kembali ke dunia kerja. Sehingga Latsar yang diselenggarakan diharapkan pula, bisa menjadi jawaban atas diklat CPNS yang selama ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka.

Artinya, perubahan Diklat Pra Jabatan menjadi Pelatihan Dasar bukan hanya perubahan nama saja, tetapi lebih kepada perubahan *mindset* PNS dalam memahami nilai-nilai dasar PNS atau ASN, yang pada akhirnya nanti saudara-saudara bisa menjadi sosok PNS yang benar-benar mempunyai kompetensi, mampu bekerja secara efektif, efisien dan akuntabel, dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Hadirin dan Peserta Latsar yang saya hormati,

Mengingat dalam Latsar tetap diberlakukan secara ketat aturan yang berlaku, maka jangan buang kesempatan dalam suatu proses yang sudah dirintis dengan panjang ini. Artinya segala sesuatu yang bersifat pelanggaran akan ada tindakan yang berupa hukuman.

Jangan sampai pula performa saudara-saudara tidak memenuhi syarat, dengan kata lain tidak lulus atau tidak sanggup menyelesaikan kegiatan Latsar sepenuhnya. Karena tidak hanya akan merugikan karier saudara-saudara sendiri, tetapi juga berdampak kepada instansi, mengingat biaya yang besar terbuang sia-sia. Harapannya semua materi yang diberikan dalam Latsar dapat memberikan efek positif bagi unit organisasi masing-masing.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penting ini. Selamat mengikuti Latsar, semoga bekal pengetahuan yang di diperoleh dapat saudara-saudara manfaatkan dan operasionalkan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, pada hari ini, Rabu Kliwon, tanggal 24 Juli 2019, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XV dan Angkatan XVI, Badan Diklat DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.

Terima kasih perhatiannya

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2019

SKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN
Peresmian Gedung Kalibrasi dan Arsip dan
Syawalan Balai Laboratorium Kesehatan dan
Kalibrasi
Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Yang saya hormati

- Kepala Dinas Kesehatan DIY
- Kepala Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan Kemenkes RI
- Kepala Sub Dit Fasyankes lainnya Kemenkes RI
- Direktur RSJ Grhasia
- Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan DIY
- Para Kepala UPT Dinas Kesehatan DIY
- Para Mantan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan

DIY

- Dan Para Hadirin sekalian

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesempatan, sehat, dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara peresmian Gedung Kalibrasi & Arsip serta Syawalan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY

Saudara-saudara yang berbahagia,

Saya atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara-saudara yang penuh keikhlasan untuk menghadiri acara hari ini, dengan berharap semoga apa yang kita lakukan menjadi amal perbuatan yang baik dihadapan Allah SWT.

Dalam Kesempatan berbahagia ini kami mengajak Saudara-Saudara untuk melapangkan dada, membuka hati dengan sabar dan penuh keikhlasan, atas Ridlo Allah SWT meminta dan memberi maaf atas kesalahan diantara kita semua. Kami menghaturkan *Selamat Idul Fitri 1440 H. Taqobbalallahu minna wa minkum. Barakallahu Fiikum*

Saudara- Saudara Yang Berbahagia,

Balai Laboratorium Kesehatan berdiri tanggal 25 Januari 1950. Merupakan laboratorium *Assaineering* yang di pimpin oleh Prof Dr Sardjito. Seiring berjalannya waktu, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta mengalami perubahan nama, berdasarkan Peraturan Gubernur 87/2018 Balai Laboratorium Kesehatan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY yang beralamat di Ngadinegaran MJ. III/62 Yogyakarta, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2018 yang mengatur tentang fungsi Balabkes dan kalibrasi sebagai unit yang memberikan pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan. Dengan demikian kami berharap Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY ini, mampu melayani Kalibrasi untuk seluruh Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Utama, Dokter praktek swasta seluruh DIY maupun Jawa Tengah bagian selatan. Mengingat layanan Kalibrasi terdekat hanya ada di PT.

Adi Multi Kalibrasi dan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta, sehingga Fasyankes yang akan melakukan kalibrasi, maka akan mengalami antrian yang sangat panjang.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya Kalibrasi bukan hanya menjadi syarat penting untuk memperoleh predikat akreditasi, tetapi alat kesehatan maupun alat laboratorium harus memiliki keakurasian yang tepat, tejamin mutunya, menjamin keselamatan bagi pengguna dan pasien, dan terjaga spesifikasi maupun kondisinya.

Saudara- Saudara sekalian,

Kami memohon doa dan restu saudara-saudara, pagi ini akan diresmikan ***Gedung Kalibrasi dan Arsip Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi “Darma Sasana Husada”***. Sesuai maknanya, Darma adalah salah satu dewa kejujuran, Sasana adalah tempat dan Husada adalah berupaya untuk sehat. Semoga fasilitas ini akan memberikan manfaat bagi semua pengguna jasa layanan medis baik teknis maupun klinis. Semoga gedung ini tidak hanya menghasilkan tenaga kesehatan yang jujur tetapi juga bisa menghasilkan alat-alat yang terkalibrasi secara baik, sehingga dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang valid serta akurat.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ka Dinkes DIY, Kepala BPFK Kemenkes RI, Ka Subdit

Fasyankes Lainnya Kemenkes RI yang telah melakukan bimbingan selama ini dan keluarnya ijin operasional sebagai Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY dari Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/1/1485/2019 , sehingga kita dapat membangun dan mengoperasikan Gedung Kalibrasi.

Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, dengan ini kami resmikan Gedung DARMA SASANA HUSADA sebagai gedung Kalibrasi dan Arsip Balai Laboratorium Dinas Kesehatan DIY.

Terima kasih.

Wabillaahit taufiq walhidaayah, wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

IR. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

**SAMBUTAN
RAPAT KERJA DAERAH DEWAN KETAHANAN
PANGAN (DKP) DIY**

Yogyakarta, 18 Juni 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua!

- Yth. Bapak-Ibu Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota atau yang mewakili;
- Yth. Bapak-Ibu Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY;
- Yth. Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Daerah atau

- yang mewakili;
- Yth. Bapak-Ibu Kepala OPD/Instansi/Lembaga Anggota Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY;
 - Yth. Bapak-Ibu Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Yth. Bapak-Ibu Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Yth. Bapak-Ibu Tamu Undangan dan Hadirin, khususnya peserta Rakerda DKP yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Kita menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi masalah hampir diseluruh wilayah Negara kita, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun 2018 masih 12,36% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional (9,82%). Ini menjadi salah satu tantangan besar agar segera dituntaskan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan target untuk menurunkan angka

kemiskinan hingga **7%** pada akhir tahun 2022 serta predikat **Zero** daerah rawan pangan. Untuk mencapai target ini, diperlukan kebijakan yang saling bersinergi antar pelaku kepentingan pembangunan ketahanan pangan.

Sinergitas program dan kerjasama para pihak merupakan syarat utama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang selama ini paling terdampak dari kemiskinan dan kerawanan pangan tersebut, seperti petani, pedagang kecil, buruh dan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya.

Kemiskinan dan kerawanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan baik yang bersifat umum yang lebih spesifik. Faktor umum yang mempengaruhi adalah :

- Kurang fokusnya layanan program karena indikator-indikator kemiskinan yang masih sering tidak sesuai dengan realita masyarakat DIY;
- Masih rendahnya nilai tukar produk pangan dan non pangan dari masyarakat;
- Kurangnya kapasitas manajemen;
- Teknik dan lemahnya akses permodalan;
- Akses pasar bagi para pelaku usaha pangan dan ekonomi baik ditingkat masyarakat maupun pemerintah di daerah serta laju konversi lahan yang tidak terkendali.

Faktor yang lebih spesifik antara lain:

- Terjadinya penyusutan lahan pangan setiap hari (2,78 ha);
- Berkurangnya pelaku utama sumber daya pangan dan ekonomi baik dari jumlah (generasi muda) maupun kapasitas /kualitas (akses teknologi terkini),
- Keterbatasan insfrastruktur fisik (irigasi, jalan usaha tani dan ekonomi),
- Belum optimalnya kelembagaan pangan dan ekonomi (kelompok tani, penyuluh, partisipasi dan koordinasi) serta dampak perubahan iklim yang belum terkelola.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY dibentuk melalui Pergub No. 32 Tahun 2010 yang diketuai oleh Gubernur, serta beranggotakan lintas OPD dan lintas stakeholder serta masyarakat. Fungsi utamanya adalah memantau dan mengkaji serta merumuskan kebijakan. DKP telah merealisasikan kerjanya melalui berbagai kegiatan, seperti:

- i. Percontohan program terpadu pengurangan kemiskinan dan mengatasi kerawanan pangan di desa-desa potensi rawan pangan (87 desa) di wilayah kecamatan-kecamatan kantong kemiskinan sejak tahun 2012;
- ii. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pangan pemerintah daerah kabupaten dan kelembagaan

- pangan desa maupun kelembagaan pangan masyarakat dengan pemberdayaan dan pemberian penghargaan;
- iii. Menginisiasi implementasi Perda DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang PLP2B serta
 - iv. Koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Nasional.

Seyogyanya, keberhasilan program tersebut segera perlu ditindak lanjuti sehingga menjadi pembelajaran pengintegrasian dan sinergitas program para pihak, baik dalam tingkatan kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran maupun dalam pelaksanaan program, termasuk upaya untuk mengelola dinamika kelembagaan pangan yang terus berkembang beriringan dengan dinamika Keistimewaan DIY. Namun pada kenyataannya keberhasilan tersebut belum menjadi program prioritas utama dan program milik bersama.

Melihat fenomena di atas, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Ketahanan Pangan Daerah DIY untuk mengkaji dan mengelola hasil pembelajaran tentang program dan kelembagaan yang terus berkembang sampai saat. Rakerda ini juga membahas program lanjutan dan program baru yang telah disusun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai sekretaris baru Dewan Ketahanan Pangan (DKP) DIY, serta menyusun prioritas kegiatan DKP DIY kedepan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Tiada gading yang tak retak, tiada hal yang tak memiliki kekurangan. Oleh karena itu marilah kekurangan tersebut kita perbaiki bersama dengan terus mengedepankan komitmen dan konsistensi dalam membangun pangan. Kita bangun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan secara terkoordinasi, terintegrasi, lintas sektor, lintas disiplin ilmu, dan lintas program.

Demikian arahan ini saya sampaikan untuk Rapat Kerja Dewan Ketahanan Pangan, sekaligus untuk pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Dengan mohon rahmat dan ridho Allah SWT, dan mengucapkan ***Bismillaahirrahmanirrohim***, Rakerda DKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

IR. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**SAMBUTAN
Rapat Koordinasi TMMD ke-105
Tahun Anggaran 2019**

**Dengan tema
“TNI Manunggal Rakyat Dalam Mewujudkan Desa
yang Maju Sejahtera dan Demokratis”**

Yogyakarta, 27 Juni 2019

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wabarakaatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Yang Saya hormati,

- Komandan Korem 072/Pamungkas
- Para Komandan Kodim se DIY atau yang mewakili
- Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah DIY atau

- yang mewakili
 - Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah
 - Kabupaten/Kota se DIY atau yang mewakili
 - Kepala Desa/Lurah serta Ketua LPMD/ LPMK
- Lokasi TMMD yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti kegiatan Rakor TMMD ke 105 (Tahap II) TA 2019.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Peserta Rakor dan jajaran TNI yang telah mendukung kegiatan Rakor TMMD ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh Pemda Kabupaten dan Kota beserta jajarannya yang telah mengalokasikan anggaran mendukung program TMMD ke 105 Tahap U TA 2019, semoga kerjasama ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan hasil TMMD dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Hadirin yang Saya hormati,

Kita pahami bersama bahwa program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian/LPNK dan komponen masyarakat yang dilaksanakan secara gotong-royong serta bukan urusan TNI saja. Marilah kita satukan tekad, bersatu padu dalam menyukseskan tugas mulia ini, demi tercapainya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Rakor TMMD merupakan kegiatan yang mengawali pelaksanaan program TMMD ke 105 Tahap II Tahun Anggaran 2019 dan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli s.d. 8 Agustus 2019 yang akan datang. Rakor TMMD ini dapat dijadikan sebagai wahana yang tepat untuk melaksanakan koordinasi secara teknis, berdiskusi dan membahas berbagai program yang akan dilaksanakan pada TMMD ke 105 Tahap II TA 2019.

Pada kesempatan Rakor ini juga akan disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan TMMD ke 106 Tahap II sebagai berikut:

Pertama, akan disampaikan paparan terkait dengan Sinergitas Program/Kegiatan Kementerian Sosial dalam mendukung pelaksanaan TMMD ke 105 di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dinas Sosial DIY.

Kedua, Paparan Rencana Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 (Tahap

II) Tahun Anggaran 2019 disampaikan dari Korem 072/Pamungkas.

Ketiga, Paparan Teknis Kesiapan Bantuan Hibah Bansos LPMD/LPMK dalam rangka pelaksanaan Ke 105 (Tahap II) Tahun Anggaran 2019 disampaikan oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY.

Dalam Rakor ini, Saya mengharapkan saran, masukan serta ide-ide kreatif dan konstruktif dari peserta untuk peningkatan dan pengembangan kualitas program TMMD ke depan.

Hadirin sekalian,

Demikian yang dapat Saya sampaikan dalam Rapat Koordinasi TMMD ke 105 (Tahap II) Tahun Anggaran 2019, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas untuk kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara yang cintai bersama. Dengan mengucap ***Bismillaahirrohmaanirrahiim***, Rapat Koordinasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 (Tahap II) Tahun Anggaran 2019, Saya nyatakan secara resmi dibuka.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



**Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
WORKSHOP
MEMBANGUN KOMITMEN DAERAH DAN
KELEMBAGAAN DALAM UPAYA
PENANGANAN *STUNTING*
Yogyakarta, 18 Juni 2019**

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.

- **Yang kami hormati, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI; Yang kami hormati, Para Narasumber;**
- **Segenap Tamu Undangan., Para Peserta Workshop yang berbahagia.**

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *insya Allah* penuh berkah ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena kita semua masih

diberi kesempatan, kekuatan dan *insya Allah* kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kita juga harus bersyukur, karena pada hari ini bisa bersama-sama berkumpul menghadiri rangkaian kegiatan Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan Stunting yang diikuti sekitar 243 peserta utusan dari Bappeda 14 Provinsi, 90 Kabupaten/Kota, serta Kementerian dan Lembaga terkait.

Masih dalam suasana lebaran, kami beserta jajaran mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua masih dipertemukan dengan Ramadhan dan Idul Fitri tahun depan. Amin.

Selamat datang kepada Bapak/Ibu sekalian dan seluruh peserta Workshop di Yogyakarta, kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan memilih DIY sebagai lokasi dilaksanakannya workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hadirin sekalian,

Sebagai pengantar pertemuan pada hari ini, perkenankanlah kami memberikan selayang pandang mengenai penyandang *stunting* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyandang *stunting* di DIY masih cukup besar, meski angka persentasenya masih di bawah yang ditetapkan oleh WHO. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, sehingga kami di Pemda perlu melakukan berbagai tindakan, baik untuk mengantisipasi maupun menangani anak-anak *stunting* ini.

Sebagai permasalahan paling mendasar yang harus segera diselesaikan, Kami kemudian melakukan intervensi dan mendesain perlakuan khusus. Sementara untuk mencegah gizi buruk dan *stunting*, sejak tahun 2014 Pemda DIY telah merintis desa model perbaikan gizi dan kesehatan untuk anak. Hingga 2017 telah terbentuk 11 desa model. Hal itu dilakukan agar penyandang gizi buruk maupun penyandang *stunting* bisa menjadi sumber daya berkualitas, menjadi generasi estafet kita masa depan.

Dalam konteks tersebut, maka kami sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan *Stunting* yang dimulai hari ini. Dengan harapan workshop dapat dijadikan sebagai momentum dan menjadi titik awal penyadaran kita semua maupun masyarakat mengenai bahaya *stunting*, dan bagaimana upaya pencegahannya, sehingga prevalensi *stunting* bisa diturunkan.

Momentum untuk bersama-sama membangun komitmen dan melakukan perlawanan terhadap *stunting* dengan serius. Sama-sama bergerak melawan *stunting*, tentunya dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang benar benar terlatih dalam melihat dan memantau anak yang memiliki masalah gizi kronis dan ada gejala gagal tumbuh. Karena jika gagal ditangani, maka akan timbul kasus *stunting* yang berdampak panjang.

Peserta Workshop dan Hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Selamat berdiskusi, dan semoga workshop ini menjadi momen yang tepat untuk membangun komitmen maupun menyamakan pemahaman, terwujudnya sinergisme dalam upaya penanganan *stunting*, sekaligus dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Kami berharap workshop kali ini menghasilkan terobosan kebijakan dan aksi-aksi baru untuk mempercepat penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI